

## **PENERAPAN PROGRAM KAMPUNGE AREK SUROBOYO (KASRPA) KAMPUNG BELAJAR DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR**

**Fadhlan Firdaus Syafrudin<sup>1</sup>, Oktarizka Reviandani<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Correspondet author: [fadhlanfirdaussyafrudin@gmail.com](mailto:fadhlanfirdaussyafrudin@gmail.com)  
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

### **Abstract**

*The research aims to determine the process of implementing the Kampunge Arek Suroboyo (KAS RPA) program in Medokan Semampir Village. This research adopts a qualitative method that uses a descriptive approach. Data collection was carried out by conducting interviews, field visits, collecting documentation. The focus of this research is to look at the implementation process, namely policy standards and targets, resources, characteristics of implementing organizations, communication between related organizations and implementation activities, attitudes of implementers and the social environment. The results of the research show that the implementation of the learning village program in Medokan Semampir Subdistrict has been effective, but there is one indicator that has not been met, namely the indicator of a social environment that is not supportive because one of the programs of the learning village, namely the reading park, is less popular because the operating hours are not in sync with school schedules, small book collections, and children's low interest in reading.*

**Keywords: Application; Arek Suroboyo Village Program (KASPRA); Learning Village**

### **Abstrak**

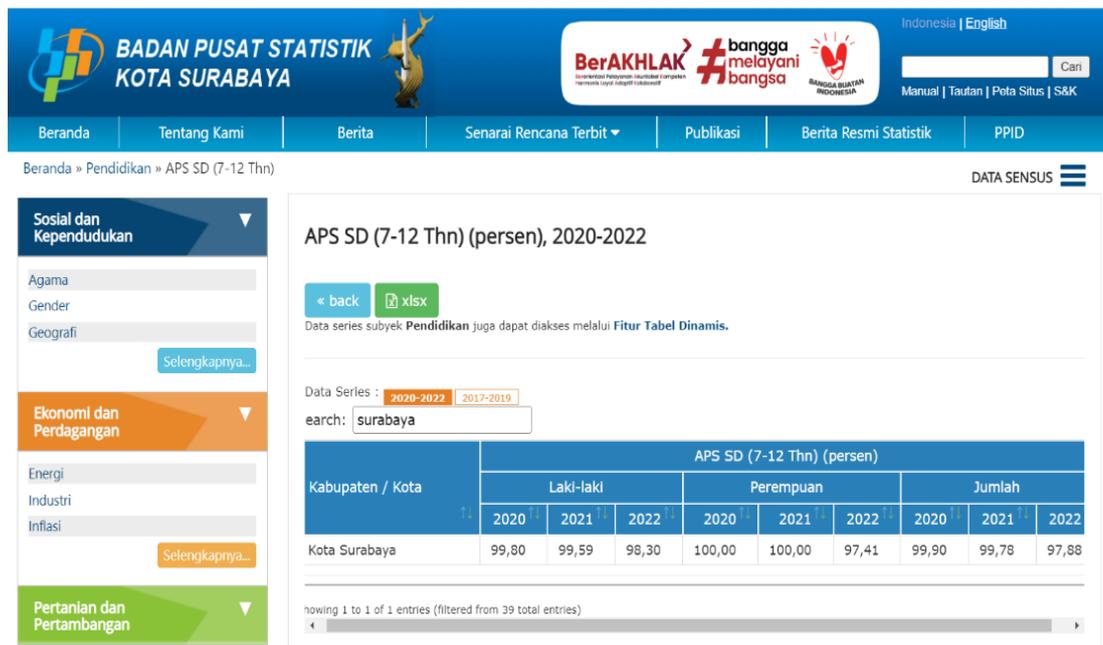
Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses penerapan program Kampung Arek Suroboyo (KAS RPA) di Kelurahan Medokan Semampir. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, kunjungan lapangan, pengumpulan dokumentasi. Fokus penelitian ini yakni untuk melihat proses penerapan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap pelaksana dan lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program kampung belajar di Kelurahan Medokan Semampir telah berjalan efektif, namun ada satu indikator yang belum terpenuhi, yakni indikator lingkungan sosial yang tidak mendukung karena salah satu program dari kampung belajar yakni taman baca kurang diminati karena jam operasional yang tidak sinkron dengan jadwal sekolah, koleksi buku yang sedikit, dan minat baca anak yang rendah.

**Kata Kunci: Kampung Belajar; Penerapan; Program Kampung Arek Suroboyo (KASPRA)**

**PENDAHULUAN**

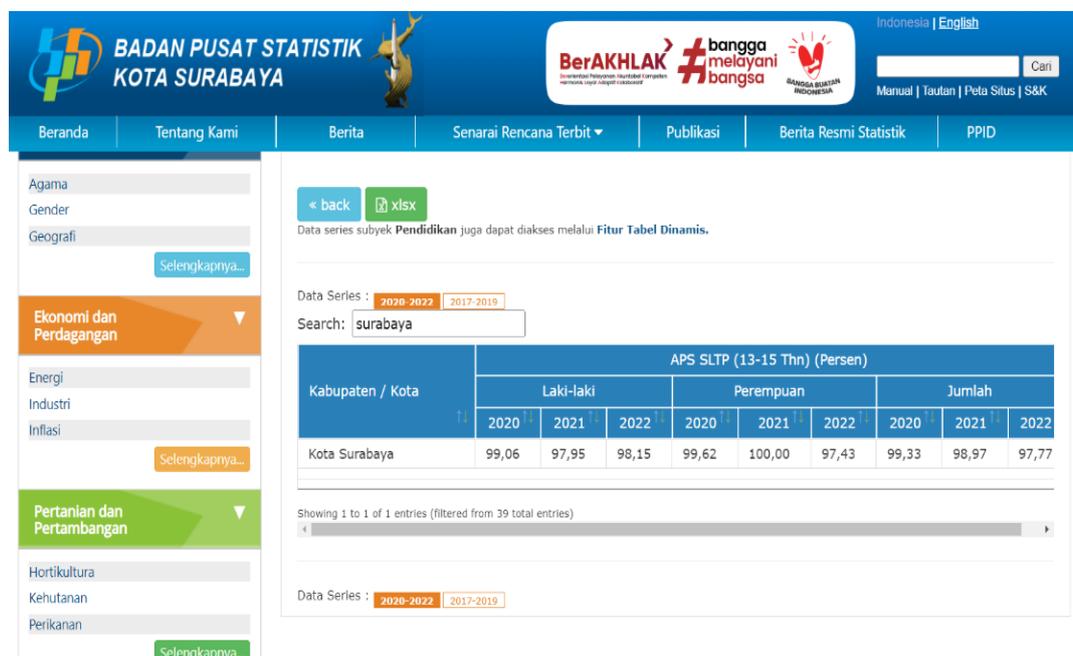
Permasalahan terhadap anak dan perempuan di Indonesia cukup sulit untuk diselesaikan, sebab ada banyak masalah yang menerpa anak dan Perempuan, seperti permasalahan kekerasan anak, eksploitasi anak, dan masalah sektor pendidikan.

**Gambar 1.** Angka Partisipasi Sekolah Dasar



Sumber : [surabayakota.bps.go.id](http://surabayakota.bps.go.id)

**Gambar 2 .**Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama



Sumber : [surabayakota.bps.go.id](http://surabayakota.bps.go.id)

**Gambar 3.** Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas

Kabupaten / Kota	APS SLTA (16-18 Thn) (Persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kota Surabaya	64,99	63,79	62,92	69,38	75,14	63,09	67,33	69,97	63,00

Sumber : [surabayakota.bps.go.id](http://surabayakota.bps.go.id)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya bahwa angka partisipasi sekolah pada anak mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Hal ini dibuktikan pada Tahun 2020-2022 angka partisipasi sekolah dasar menurun dari angka 99,80% menjadi 98,30%. Angka partisipasi sekolah menengah pertama menurun dari angka 99,06% menjadi 98,15%. Lalu angka partisipasi sekolah menengah atas juga menurun dari angka 63,79% menjadi 57,25% (BPS Kota Surabaya, 2022).

Melihat rendahnya angka partisipasi sekolah di Kota Surabaya, maka pemerintah melakukan berbagai Upaya untuk menangani permasalahan tersebut. Upaya penanganan permasalahan anak ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Pemerintah Kota Surabaya juga membuat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Responsif Gender di Kota Surabaya.

Pada akhirnya, Pemerintah Kota Surabaya membuat program KAS RPA (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak) yang telah dijalankan sejak tahun 2015 sebagai upaya Kota Surabaya untuk mewujudkan pemberian hak yang setara antara perempuan dan anak-anak pada tingkat masyarakat yang paling dasar yaitu kampung. Program KAS RPA adalah salah satu inovasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengakomodir ruang bagi anak melalui pemberian hak pemberian pendidikan secara sosial dan jasmani terhadap perempuan dan anak. Program ini sendiri terbentuk atas kerja sama antar sektor. Adapun sektor yang terlibat adalah perguruan tinggi, NGO (*Non Governmental Organization*), dan dunia industri.

Program KAS RPA terdiri dari 5 program yang terdiri dari Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Asuh, Kampung Aman, dan Kampung Kreatif dan Produktif. Adapun tujuan

dari dibentuknya program ini adalah terciptanya lingkungan kampung yang madani, responsif, mendukung, baik dan menjadi tempat yang menjadi tempat untuk pemberdayaan Perempuan dan anak secara maksimal.

Melihat menurunnya angka partisipasi sekolah di Kota Surabaya, maka pemerintah menjawab permasalahan tersebut melalui kegiatan kampung belajar yang ada pada program KAS RPA. Kegiatan ini dapat dengan mudah diikuti oleh anak-anak dan remaja di sekitar lokasi tempat tinggal mereka. Dalam kegiatan kampung belajar ini pemerintah menyediakan fasilitas belajar gratis melalui program sinau bareng, ngaji bareng, pendidikan non formal, taman baca masyarakat. Berbagai macam kegiatan tersebut dapat diikuti oleh seluruh anak dan remaja di sekitar dengan waktu yang fleksibel, sehingga secara tidak langsung program ini meningkatkan minat anak dan remaja untuk belajar dan angka partisipasi sekolah di Kota Surabaya pun membaik.

Penerapan kebijakan adalah salah satu langkah untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat dapat berjalan atau tidak. Penerapan kebijakan adalah suatu langkah yang dilakukan setelah adanya perintah dan arahan untuk meliputi, mengelola, dan menghasilkan luaran di masyarakat. Proses penerapan baru bisa dilihat jika telah dibuat sasaran dan tujuan penerapan. Setelah adanya sasaran dan tujuan, maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam kebijakan terdapat kegiatan yang dibuat guna memperoleh nilai, arah yang diinginkan dengan cara yang sesuai, dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan yang biasanya adalah aparat yang berkepentingan. Berdasarkan adanya program KAS RPA maka penulis ingin mencoba melihat seberapa efektif penerapan program KAS RPA pada indikator kampung belajar.

## **METODE**

Riset ini mengadopsi metode penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melakukan kegiatan mendeskripsikan suatu hal dengan rinci dan mempermudah peneliti untuk mendapatkan kebenaran yang dilakukan melalui pencermatan secara spesifik. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif program KAS RPA dalam menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kelurahan Medokan Semampir yang mengadopsi teori dari *Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)*. Adapun lokasi penelitian ini diadakan di Balai RW 07 Kelurahan Medokan Semampir. Hasil penelitian didapatkan dengan melakukan kegiatan wawancara, kunjungan lapangan, dan dokumentasi kegiatan.

Pencarian data dilakukan dengan menerapkan data yang diambil dari data primer. Data primer didapatkan dari wawancara dan kunjungan ke lapangan yang menggunakan

masyarakat sebagai responden dalam penelitian seperti kader surabaya hebat, pengelola balai rw dan tenaga pendidik.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif program KAS RPA dalam menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kelurahan Medokan Semampir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

Hal sesuai dengan teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan "apa yang terjadi" dan "bagaimana". Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya. Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan "mengapa", dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Selanjutnya, kajian implementasi model implementasi kebijakan dengan fokus penelitian ini yaitu Penerapan Program Kampunge Arek Suroboyo (KAS RPA) Kampung Belajar di Kelurahan Medokan Semampir dengan mengadopsi teori penerapan dari *Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)* yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Ode et al., 2023).

Saat penerapan Program KAS RPA pada indikator Kampung Belajar dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada Bulan September 2023, penerapan program dilaksanakan penulis dengan melakukan observasi dan pendampingan kegiatan secara langsung.

### **1. Standar dan Sasaran kebijakan**

Penerapan standar dan sasaran kebijakan telah dilaksanakan secara efektif oleh pelaksana kebijakan, hal ini dapat dilihat ketika pelaksana kebijakan telah mengetahui cita-cita dari kebijakan, kebijakan akan gagal diterapkan jika pelaksana kebijakan tidak mengerti dan menolak untuk menerapkan suatu kebijakan (*Van Mater dan Van Horn, 1975*).

Berdasarkan temuan di lapangan pelaksana kebijakan program KAS RPA telah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan, hal ini dibuktikan ketika penerapan program KAS RPA pada indikator kampung belajar berhasil dijalankan dengan baik dan berhasil memenuhi semua indikator yang ditentukan. Adapun indikator dari kampung belajar adalah sinau bareng, ngaji bareng, dan pendidikan non formal. Pernyataan ini didukung oleh keterangan dari Bu Istiyah selaku Ketua RW 07, beliau menyampaikan bahwa :

“ Kampung Belajar di RW 07 sudah berjalan baik karena disini sudah ada beberapa program yang berjalan seperti kegiatan pendidikan non formal yang dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Jumat. Ngaji Bareng yang dilaksanakan setiap hari Rabu, serta sinau bareng yang dilaksanakan di hari Senin dan Sabtu yang bekerja sama dengan RW 02”. (Hasil wawancara 20 November 2023)

## 2. Sumber daya

Suatu kebijakan akan dikatakan sukses jika berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada. Adapun sumber daya yang dominan digunakan saat Balai RW 07 ingin menerapkan program KAS RPA pada indicator kampung belajar adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Bu Istiyah selaku Ketua RW 07 menjelaskan terkait pemenuhan sumber daya, beliau mengemukakan bahwa:

“Semua fasilitas yang ada di balai rw dimanfaatkan oleh seluruh pelaksana kebijakan dan masyarakat untuk melaksanakan program kampung belajar, mereka memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan sumber daya finansial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai penunjang keberhasilan program kampung belajar”. (Hasil wawancara 20 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM bisa dilihat dari pelibatan guru paud, penjaga taman baca, guru sekolah, guru pengajian, petugas taman baca, dan pengelola balai rw. Sumber daya tersebut bekerja sama untuk menerapkan program kampung belajar seperti paud, sinau bareng, ngaji bareng, taman baca, dan bunda mendongeng. Sedangkan sumber daya finansial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya digunakan untuk renovasi balai rw, penyediaan alat bermain dan belajar, dan pemberian insentif secara rutin kepada guru dan pengelola balai rw.

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi memerlukan pelaksana kebijakan yang bersifat demokratis dan persuasif, maka pelaksana kebijakan program KAS RPA pada indicator kampung belajar wajib memperhatikan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang berlaku.

Pernyataan ini didukung oleh Ibu Istiyah selaku Ketua RW 07, beliau menyampaikan bahwa :

“Oh iya semua tenaga pendidik yang bertugas di balai rw sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, contohnya guru datang tepat waktu, materi yang diberikan juga bagus, dan tenaga pendidiki mampu menghidupkan suasana belajar menjadi lebih kreatif”. (Hasil wawancara 20 November 2023)

SOP yang berlaku sudah dipatuhi dengan baik oleh seluruh tenaga pendidik yang terlibat, misalnya mereka datang mengajar tepat waktu, memberikan materi ajar yang sesuai dengan usia, dan mampu melaksanakan pembelajaran dengan kreatif.

#### **4. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan Pelaksanaan**

Komunikasi berperan penting untuk menciptakan kegiatan yang baik, kegiatan penerapan kebijakan menurut *Van Horn dan Van Mater* (1974) menyampaikan bahwa standar dan tujuan harus dipahami oleh pelaksana kebijakan dan wajib memberikan komunikasi yang konsisten dan efektif. Pernyataan ini didukung oleh Ibu Anik selaku Ketua Tim Pengarusutamaan Gender, beliau menyampaikan bahwa :

“ Sebelum pelaksanaan program KAS RPA kampung belajar kami dari dinas pemberdayaan selalu berkomunikasi dengan kampung terkait koordinasi dan teknis dari pelaksanaan program, sehingga saya rasa komunikasinya sudah baik, terbukti dari program KAS RPA yang saat ini sudah berjalan baik di masing-masing kampung”. (Hasil wawancara 20 November 2023)

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Istiyah sebagai Ketua RW 07, beliau mengemukakan:

“ Iya mas komunikasi sebelum pelaksanaan program kas rpa berjalan lancar, pihak dinas dan pihak kampung yang diwakili balai rw berhasil mengadakan rapat koordinasi untuk memeberikan pemahaman mengenai standar dan tujuan dari kebijakan KAS RPA ini mas”. (Hasil wawancara 20 November 2023)

Kebijakan berjalan efektif jika adanya komunikasi efektif dan konsisten antara organisasi publik, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa dinas Pendidikan, dan dinas pemberdayaan Perempuan bekerja sama untuk membuat program KAS RPA dan memberikan komunikasi yang efektif dan penerapan standar dan tujuan yang jelas kepada pelaksana kebijakan seperti guru paud, penjaga taman baca, guru sekolah, guru pengajian, dan pengelola balai rw untuk menerapkan indikator kampung belajar di balai rw 07.

#### **5. Sikap Pelaksana**

Menurut Van Metter dan Van Horn di Agustinus (2006) sikap pelaksana kebijakan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan, sebab pada umumnya kebijakan yang diterapkan tidak memperhatikan keadaan di lapangan sehingga terjadi penolakan dari pelaksana kebijakan. Perlu diketahui bahwa ada tiga macam elemen respon yang ada ketika hendak menerapkan kebijakan, elemen tersebut adalah pengetahuan (*cognition*), respon pelaksana (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga adalah intensitas kebijakan.

Ibu Istiyah selaku Ketua RW 07 Kelurahan Medokan Semampir menyampaikan bahwa:

“Seluruh pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan program KAS RPA sudah mengetahui cara kerja dari program ini, dan respon dari pelaksana seperti guru dan pengelola balai rw sangat baik yang terbukti dengan kesanggupan mereka untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, dan para pelaksana kebijakan seperti

kami cukup serius untuk menjalankan program dari pemerintah". (Hasil wawancara 20 November 2023)

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksana kebijakan yaitu guru paud, penjaga taman baca, guru sekolah, guru pengajian, dan pengelola balai rw memahami standar dan tujuan kebijakan program KAS RPA, karena pelaksana kebijakan memahami tujuan dari program KAS RPA maka otomatis pelaksana kebijakan memberikan respon baik dan menerima kebijakan untuk bisa diterapkan di balai rw.

## 6. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial dari masyarakat juga turut berperan apakah kebijakan tersebut telah berhasil diterapkan di masyarakat, sebab lingkungan sosial yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab sebuah kebijakan gagal diterapkan. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat lingkungan sosial yang tidak mendukung salah satu indikator program kampung belajar pada kebijakan KAS RPA, indikator yang tidak terpenuhi tersebut adalah indikator taman baca masyarakat.

Ibu Ririn selaku penjaga taman baca RW 07 memberikan jawaban terkait program taman baca yang belum berjalan baik. Beliau mengatakan bahwa:

" Memang permasalahan taman baca ini cukup kompleks, buku yang disediakan disini memang sedikit, minat membaca anak yang rendah, jam operasional juga yang tidak sinkron dengan jadwal sekolah, sehingga hal ini membuat taman baca kurang diminati oleh anak-anak dan remaja disini". (Hasil wawancara 20 November 2023)

Indikator taman baca masyarakat tidak berjalan baik disebabkan minat membaca anak-anak yang rendah, ketidaktahuan masyarakat akibat adanya program taman baca, jam operasional taman baca yang tidak sinkron dengan jam sekolah anak-anak, dan koleksi buku yang sedikit membuat anak-anak bosan jika hanya membaca buku yang sama. Sehingga alasan yang dijelaskan diatas menjadi penyebab mengapa program taman baca gagal diterapkan di Balai RW 07.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Proses penerapan Program Kampunge Arek Suroboyo (KAS RPA) Kampung Belajar di Kelurahan Medokan Semampir telah berhasil dilaksanakan. Dukungan teori Van Horn dan Van Mater (1974) dan pemenuhan 5 dari 6 indikator menunjukkan keberhasilan, dengan satu indikator (lingkungan sosial) yang belum terpenuhi. Pelaksanaan program ini berhasil karena pencapaian tujuan kebijakan, optimalisasi sumber daya, karakteristik organisasi yang terpenuhi, komunikasi antar organisasi yang efektif, dan sikap positif dari pelaksana kebijakan. Meskipun demikian, implementasi

program taman baca di Balai RW 07 belum berhasil karena beberapa kendala seperti koleksi buku yang terbatas, jam operasional yang tidak sinkron, dan minat membaca anak yang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: ALPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- Amanah, S. N., Reviandani, O., Publik, A., Sosial, F. I., & Politik, I. (2023). *Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di. 09*, 68–77.
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers, 01(02)*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- BPS Kota Surabaya. (2022). *APS SD (7-12 Thn) (persen), 2020-2022*. <https://surabayakota.bps.go.id/indicator/28/212/1/aps-sd-7-12-thn-.html>
- GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9)*, 1689–1699.
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. 2022. Implementasi Program Penanggulangan Pravelansi Stunting Anak Balita Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. *Journal Publicuho, 5(2)*.
- Mochklas, M., Rusmawati, Z., Santoso, A., & Jannah, R. (2019). Pendampingan Kampung Pendidikan Kampung'E Arek Suroboyo (Kp Kas) Rw 03 Kelurahan Ketintang Surabaya. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1)*, 51–59. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.470>
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). *Journal of Governance and Public Policy, 10(3)*, 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Oktavia, A. P., & Kurniawan, B. A. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG PENDIDIKAN KAMPUNGE AREK SUROBOYO DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DP5A SURABAYA. 6(1)*.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019
- Putri, B., & Reviandani, O. (2023). Penerapan E-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(1)*, 78–96. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6829>
- Ulfaika, R., Ajisoko, P., Vega, N. De, Kusmaryani, W., & Rianto, A. (2022). *MENGURANGI LEARNING LOSS BAGI PESERTA. 5*, 3413–3421
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & society, 6(4)*, 445-488.